

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, & KERANGKA KONSEP

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan tujuan agar menghindari kesamaan judul ataupun melihat perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Berikut adalah beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya yaitu :

Table 1. Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian Sebelumnya | Metode | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|
| 1 | <i>Ahmad Taufik Sudirman (2016): “Pemberdayaan Ekowisata Berbasis Tradisional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros” Universitas Muhammadiyah Makassar</i> | Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan pengolahan datanya dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan. Kemudian dilakukan wawancara ke berbagai informan dan sumber yang berkompeten sesuai | Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengembangan Ekowisata Berbasis Tradisional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Bantimurung Bulusaraung, yang sekaligus menjadi tujuan utama dalam penelitian ini. Bahwa Ekowisata sebagai salah satu lembaga sosial di dalam masyarakat perlu mendukung pembangunan yang |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | informasi yang dicari dari berbagai kalangan masyarakat mewakili komposisi penduduk secara utuh. | dicanangkan terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena hadirnya Ekowisata sudah mendapat dukungan dan tanggapan positif dari masyarakat maka perlu berperan aktif pada pembangunan kesejahteraan masyarakat. |
| 2 | <i>Nazarullail Fikri (2017) : Pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata (studi kasus profil pemberdayaan masyarakat melalui program ekowisata "Lepen Adventure" di Dusun Bajulmati)</i> | Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Data penelitian digali secara mendalam melalui teknik wawancara observasi dan dokumentasi tentang profil pemberdayaan masyarakat dalam program | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perubahan masyarakat melalui program ekowisata dan mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program ekowisata tersebut. Pemberdayaan melalui program ekowisata juga telah merubah pola pikir masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan terutama pada |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>ekowisata di Dusun Bajulmati. Sumber data penelitian dipilih dengan menggunakan snowball sampling melalui informan kunci yaitu agen pemberdayaan masyarakat yang telah ditentukan terlebih dahulu dan selanjutnya informasi secara mendalam didapatkan peneliti dari informan lain yang memiliki informasi tentang fokus penelitian.</p> | <p>lingkungan keluarga. Proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu (1) keteladanan (2) penyadaran (3) pengkapasitasan dan (4) pendayaan.</p> |
| 3 | <p><i>Nur Hidayat (2019): "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pemberdayaan Desa Wisata" Institut Agama</i></p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, berupa dokumen tertulis maupun lisan dari narasumber</p> | <p>Hasil penelitiannya adalah upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Karangbanar Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu,</p> |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| | <i>Islam Negri Purwokerto</i> | <p>penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis dan keabsahan data, penulis menggunakan tiga metode, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan</p> | <p>Kabupaten Cilacap yang cenderung telah menghasilkan kesejahteraan sosial masyarakat, meskipun belum maksimal dalam segi mental yakni berdasarkan tingkat pendidikan dan segi fisik berdasarkan kebersihan lingkungan. Sedangkan pengembangan desa wisata yang telah dilakukan, secara keseluruhan belum sesuai dengan teori pengembangan desa wisata oleh Made Antara dan I. Nyoman Sukma Arinda, karena desa wisata tersebut belum melakukan pelatihan ToT (training of trainer), CO (community organizer), potensi fisik dan sosial budaya.(facrudin, 2018)</p> |
| 4 | Mukhamad Nur | Dilakukan dengan | Pemberdayaan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | W (2016). <i>Pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata (studi kasus di Lembaga Sosial Pendidikan Harapan Bajulmati Dusun Bajulmati Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)</i> | tahapan reduksi data penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. | masyarakat melalui ekowisata yang dilakukan di lembaga pendidikan sosial harapan bajulmati berjalan secara tidak disengaja dengan program utama pendidikan dusun bajulmati menjadi obyek ekowisata karena LSP Harapan Bajulmati mengajak wisatawan yang datang tidak hanya berwisata dengan alam melainkan belajar akan budaya dan adat istiadat masyarakat Bajulmati melalui Homestay berkonsep Live In berkonservasi dengan menanam mangrove dan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di Dusun Bajulmati. |
| 5 | <i>Nensy Lusida, (2020) : Pemberdayaan</i> | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p><i>Masyarakat Melalui Pengembangan Agro-Ekowisata Di Desapolitan Jomboran Kota Klaten</i></p> | <p>dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang memahami lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua komponen. Pertama, yaitu data primer yang diperoleh dari dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian. Kedua, yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku, penelitian lapangan, dan dokumen</p> | <p>masyarakat di Desa Jomboran dilaksanakan melalui proses panjang yaitu pembentukan tim, sosialisasi., pelatihan, pelaksanaan kegiatan dan kesadaran. Tahap paling melemahkan yaitu pembentukan tim dan tahap paling berhasil yaitu pelatihan. Proses pemberdayaan tersebut belum mencerminkan keberdayaan dikarenakan kegiatan tidak melibatkan seluruh masyarakat. Proses pemberdayaan ini dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia di masyarakat yang menunjukkan pengaruh positif, hubungan kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat yang menunjukkan pengaruh negatif, dan sengketa di zona pengembangan wisata yang menunjukkan pengaruh</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>negatif. Pemberdayaan masyarakat di Desa Jomboran perlu memunculkan sosok yang ahli dibidang pemberdayaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program pemberdayaan dapat menyentuh setiap individu masyarakat dan sebaiknya lebih membuka diri terhadap pihak ketiga supaya dapat mendukung proses pemberdayaan.</p> |
|--|--|--|--|

2.2 Kajian Teori

A. Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berkaitan dengan sesama makhluk hidup lainnya, suka tidak suka manusia hakikatnya saling ketergantungan antara sesama manusia. Dalam ketergantungan antara sesama manusia mempunyai rasa timbal balik antar sesama yang nanti akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang sejahtera. Kondisi sejahtera biasanya merujuk kepada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya tatanan kehidupan yang meliputi material maupun spiritual.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan berelasi dengan lingkungannya

secara baik (Fahrudin, 2018). Menurut PBB dalam (Fahrudin, 2018) kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 yang diganti dengan UU No 11 Tahun 2009 yang dikemukakan (Fahrudin, 2018) tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai suatu keadaan seseorang yang menjadikan tolak ukur dari kelayakan fungsi sosial seseorang. Berikut ini kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan. Menurut Suparlan dalam (Suud, 2006) kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam (Suud, 2006) Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Jika dalam teori diatas kesejahteraan adalah sebuah kondisi yang dialami oleh masyarakat maka, kondisi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Burung bisa dikatakan bahwa kondisi masyarakat desa tidaklah sejahtera yang mana telah disebutkan juga dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang ditemui di Desa Tanjung Burung sudah rusak atau tidak berfungsi lagi fungsi sosial masyarakatnya terutama dalam hal ekonomi masyarakat yang ada. Masyarakat tak bisa lagi melaksanakan fungsi ekonominya yang mana pada hal ini sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Burung.

Selain sebagai suatu keadaan, dalam kesejahteraan sosial pun dilihat juga sebagai suatu kegiatan. Berikut ini definisi-definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan. Menurut Durham dalam (Suud, 2006), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Menurut (Fahrudin, 2018) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi pencegahan (Preventive)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (Curative)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (Development)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (Supportive)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Dalam fungsi-fungsi tersebut mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berketergantungan satu sama lain dan saling membantu, agar kehidupan berjalan secara selaras dan harmonis yang menciptakan suasana yang sejahtera. Point 4 dalam fungsi kesejahteraan yang terkait dengan pengembangan ini lah yang sedang

dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ada di Desa Tanjung Burung yang mana masyarakat sedang melakukan pengembangan dalam hal ekonomi melalui ecowisata yang mana pengembangan ini bersumber dari potensi-potensi yang ada di dalam Desa Tanjung Burung. Yang mana dalam hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mempertahankan ekonomi melalui ecowisata di Desa Tanjung Burung.

B. Modal Sosial

Brehmdan Rahn(1997)berpendapat bahwa modal sosial adalah jaringan kerjasarna di antara warga masyarakat yang rnefasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Definisi lain dikemukakan oleh Pennar (1997) yang mengemukakan bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang mempengaruhi perilaku individual yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Woolcock mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia yang berupa saling percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai serta perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Jadi menurut kelompok pertama ini modal sosial akan semakin kuat apabila sebuah komunitas atau organisasi memiliki jaringan hubungan kerjasama baik secara internal komunitas atau organisasi, atau hubungan antar komunitas atau organisasi. Jaringan kerjasama yang sinergetik akan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

Pendapat kedua oleh antara lain para pakar berikut ini. Fukuyama (1997) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-rorrna informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. Definisi yang dikemukakan Fukuyama ini mengandung beberapa aspek

nilai yang dikemukakan oleh Schwartz (1994). Nilai-nilai tersebut adalah: (1) universalism, nilai tentang pemaharuan terhadap orang lain. Apresiasi, toleransi, serta proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya; (2) benevolence, nilai tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain; (3) tradition, nilai yang mengandung penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional; (4) conformity, nilai yang terkait dengan pengekangan diri terhadap dorongan dan tindakan yang merugikan orang lain; (5) security, nilai yang mengandung keselamatan, keharmonisan, kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. Sejalan dengan pendapat Fukuyama, Bowles dan Gintis (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai kapital sosial yang pada umumnya merujuk pada kepercayaan, perhatian pada suatu kelompok, kemauan untuk hidup dengan norma dari satu komunitas.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “Power”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau empowerment, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah.

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat barat, terutamanya Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang neoMarxisme, freudianisme, strukturalisme, dan sosiologi kritik Frankfurt School.

Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang muncul pada paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur dan anti-determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan (Widayanti, 2012). Sementara terminologi pemberdayaan masyarakat (people empowerment) mulai dipopulerkan di Indonesia sejak tahun 1980-an. Pada mulanya lebih dikenal dengan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga non pemerintah (NGO), namun kini telah menjadi satu konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Hampir semua departemen/lembaga pemerintah non departemen memiliki program pemberdayaan masyarakat atau konsen dengan 'isu' memberdayakan masyarakat yang dicantumkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Hal seperti ini juga berlaku di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian, dengan tafsir yang berbeda terhadap konsep pemberdayaan, pelaksanaan program pemberdayaan telah melumpuhkan masyarakat menjadi lebih tak berdaya untuk mandiri, artinya program pemberdayaan lebih menambah tingkat ketergantungan masyarakat pada bantuan pihak lain (Muflich, 2006).

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses

pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto, 2008).

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Nugroho, 2001).

Dalam penelitian ini menggunakan 2 teori diatas yang mana teori ini dianggap relevan dengan penelitian yang ada di Desa Tanjung Burung. pada teori ini menekankan pada pemberdayaan yang menekankan kepada proses untuk menguatkan individu atau kelompok untuk mendorong dan memotivasi masyarakat dalam agar mempunyai kekeuatan dalam menentukan pilihan hidupnya sendiri untuk mewujudkan perubahan sosial dalam berpartisipasi memenuhi kebutuhan sosialnya sendiri. Hal ini selaras dengan yang terjadi di Desa Tanjung Burung yang mana masyarakat yang sudah tidak memiliki penghasilan karena lahan mata pencahariannya sudah hilang akibat adanya perubahan alih fungsi lahan membuat sebuah wadah yang mana wadah tersebut didirikan dengan tujuan untuk memperkuat dan juga mempertahankan mata pencaharian mereka agar tidak hilang dengan mendirikan ecowisata di tengah-tengah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Wadah ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan program yang sudah ditentukan untuk suksesnya ecowisata ini menjadi peralihan mata pencaharian masyarakat yang hilang.

D. Pemberdayaan Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (people or community centered development).

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development disajikan dalam Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan

kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Sesuai dengan visi Community Empowerment for Rural Development (CERD) yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan.

Sekarang saatnya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru tersebut dengan tetap diiringi dan dipantau oleh tim monitoring dari pihak terkait untuk menjaga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat sesuai yang dicanangkan sejak awal. Proses pemberdayaan masyarakat yang efisien akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan keberlanjutan karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Namun yang terjadi di Desa Tanjung Burung dalam mengelola ecowisata ini sangat mini sekali keterlibatan pemerintah dalam proses pemberdayaan yang ada. Pemerintah lokal seperti pemerintah desa sampai ke pemerintah pusat terkesan enggan untuk memberikan pelayanannya terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Burung. Bantuan yang diberikan hanya sebatas pemberian izin kepada kelompok tani hutan untuk mengelola ecowisata yang ada. Bantuan seperti dana dan yang lain-lain kelompok tani hutan Tanjung Burung harus bersusah payah mencari pendanaannya sendiri dalam melaksanakan ecowisata yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan

pemberdayaan melalui ecowisata terkesan lambat untuk berkembang karena kurangnya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan ecowisata yang dikelola oleh masyarakat.

E. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik. Adapun prinsip pemberdayaan masyarakat, Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. (Sumaryadi, 2005: 94-96)

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam 20 komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukandalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Beberapa prinsip mengenai pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Suharto dalam Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, sebagai berikut:

a. Membangun relasi pertolongan yang:

1. merefleksikan respon empati
2. menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination)
3. menghargai perbedaaan dan keunikan individu
4. menekankan kerjasama klien (client partnership)

b. Membangun komunikasi yang:

1. menghormati martabat dan harga diri klien
2. mempertimbangkan keragaman individu
3. berfokus pada klien
4. menjaga kerahasiaan klien.

c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang:

- (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah

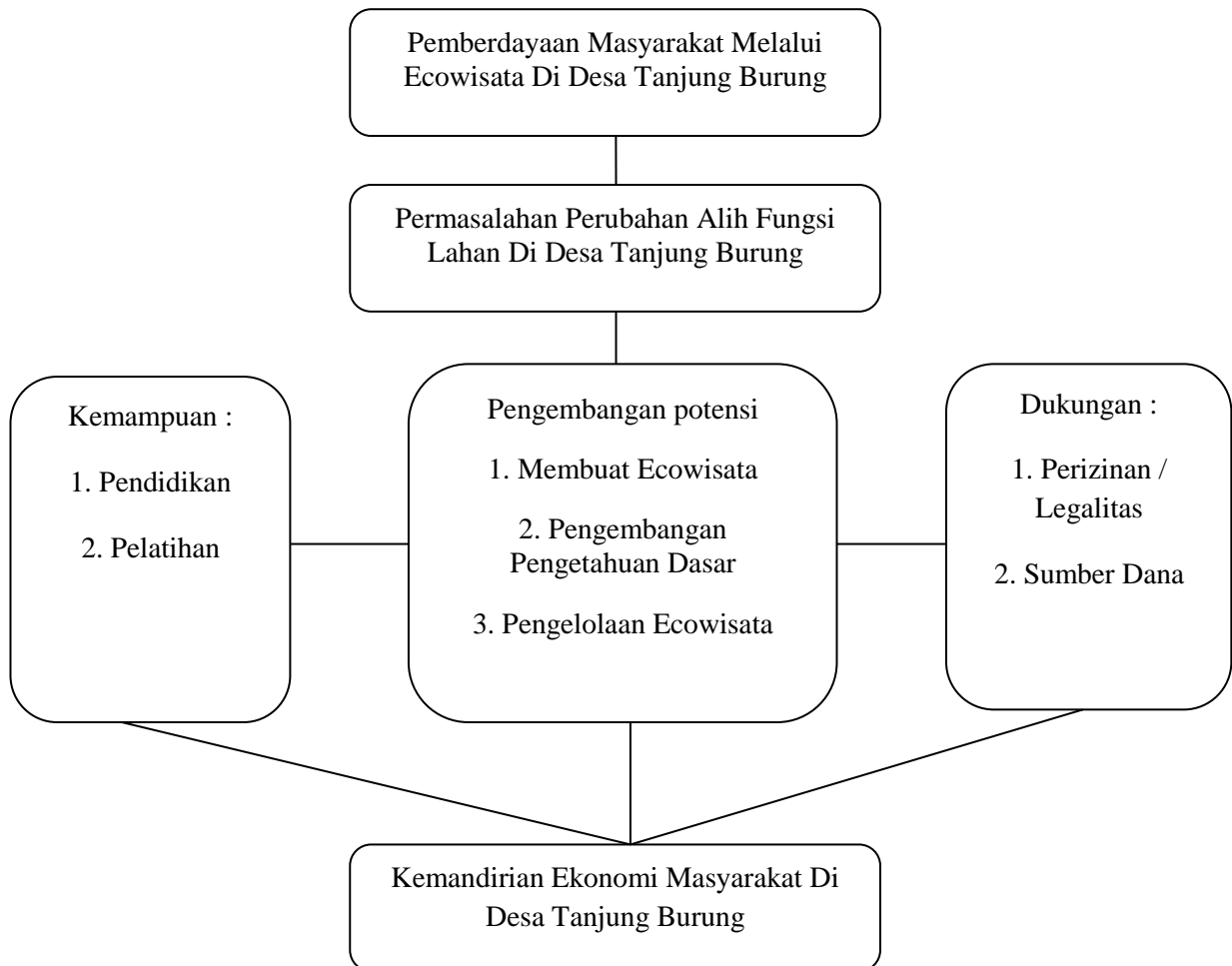
- (2) menghargai hak-hak klien
- (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar
- (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:

1. ketaatan terhadap kode etik profesi
2. keterlibatan dalam pengembangan professional riset dan perumusan kebijakan
3. penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public
4. penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. (Suharto, 2005:68)

Uraian di atas menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat menempatkan dirinya sebagai actor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang ada disekitarnya. Tingkat kepekaan terhadap satu sama lain dalam menghadapi sebuah masalah sangat dibutuhkan dalam sebuah aktivitas pemeberdayaan masyarakat.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Konsep

Pemberdayaan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Pengertian pemberdayaan menurut Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,